

## Daftar Pustaka

- Achmad Chomzah, Ali., 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Harsono, Boedi., 2000, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- IPPAT, 2002, *Riwayat Singkat Sejarah Perjalanan Keberadaan PPAT Di Indonesia*, Pengurus Pusat IPPAT, Jakarta.
- Kartini, Soedjendro J., 2001. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Kanisius. Yogyakarta.
- Moekijat, 1989, *Tanya Jawab Asas-asas Manajemen*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Perangin, Effendi., 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim, Ridwan, A., 1983, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salindeho, John. 1993. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Siagian, Sondang P., 1995, *Filsafat Administrasi*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Cetakan ketiga, Jakarta.
- Sugondo, R., 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.



-----, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH-UGM, Yogyakarta.  
Toha, Miftah., 1991, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

### **Kitab dan Himpunan Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Direktorat Jendral Agraria/Kepala BPN No. 1/1996.